DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996)

Bachtiar effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaanya, (Bandung : Alumni,1993)

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta:Djambatan, 2003)

Florinsius SP Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah, (Jakarta : Visimedia, 2007)

Jimmy Joses Sembiring, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, (Jakarta : Visimedia, 2010)

J. Moeleong Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1994)

Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta : Kencana,2005),

Hasan Basri Nata Menggala Dan Sagita, Pembatalan Hak dan Kebatalan Hak atas Tanah, (Yogyakarta : Tugu Jogja Pustaka,2005)

Maria S.W.,2005 Sumardjono,Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2005)

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : PT Ghalia Indonesia : 2003),

Mhd. Ymin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung : Mandar Maju, 2008.)

P. Joko Subgyo, Metode Penelitian, cetakan kelima, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006)

S. Chandra, Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, (Jakarta: PT Grasindo, 2005)

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)

Suardi, Hukum Agraria, (Jakarta : Iblam, Tahun 2005)

Urip Santosa, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2006)

Urip Santosa, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2011)

B. Peraturan Perundang - undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftarn Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Penagaturan Tanah.

Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan Kotamadya atau Kabupaten.

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 600-900.